



**Judul** : Asal Ada Penurunan Suku Bunga Kredit: Pelaku Usaha Mikro Bakal Berduyun-duyun Ke Bank  
**Tanggal** : Rabu, 27 Oktober 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Asal Ada Penurunan Suku Bunga Kredit

# Pelaku Usaha Mikro Bakal Berduyun-duyun Ke Bank

**Senayan berharap pembentukan BUMN Holding Ultra Mikro (UMi) berdampak pada penurunan suku bunga kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jika suku bunga turun, masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendapatkan permodalan.**

ANGGOTA Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan, suku bunga kredit murah bakal membantu masyarakat membiayai usahanya dengan harga terjangkau. Penurunan suku bunga tersebut akan berdampak pada roda perekonomian daerah.

“Semakin mudah diakses, maka akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tetapi sayang, sampai hari ini hal itu belum terjadi,” ujar politisi muda PDIP ini.

Karena itu, dia mendorong agar regulasi, *road map* dan target terkait penurunan suku bunga ini segera dibuat.

Sebagaimana diketahui, pembentukan Holding UMi telah difinalisasi di mana PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi induk dari holding ini. BRI selaku induk holding membawahi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Nilai pengalihan saham negara kepada BRI senilai Rp 54,7 triliun. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT BRI Tbk.

Lalu, Keputusan Menteri Keuangan pada 16 Juli 2021 perihal Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Modal Saham BRI.

Sementara, anggota Komisi VI Intan Fauzi mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2023.

Perpanjangan relaksasi restrukturisasi diyakini menjadi solusi tepat bagi UMKM untuk bangkit di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Adapun pertimbangan OJK memutuskan memperpanjang periode restrukturisasi kredit didasari kondisi debitur yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pulih dari dampak Covid-19.

Intan berharap, program restrukturisasi ini diikuti dengan kebijakan hapus buku kredit macet bagi UMKM yang terdampak pandemi sehingga tidak

masuk dalam daftar hitam perbankan.

“Jangan sampai melakukan restrukturisasi, tetapi catatan kredit macet justru menyulitkan mereka untuk mendapatkan kredit baru,” kata Intan.

Intan menilai, tingkat Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang ada saat ini belum sepenuhnya ramah bagi pelaku UMKM. Padahal sejatinya perlakuan kredit tidak bisa disamakan dengan non UMKM.

Menurut dia, SBDK bank milik pemerintah atau Himbara saja saat ini berkisar di 8 sampai 9 persen. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus bagi pelaku UMKM sehingga kredit dari perbankan ini bisa betul-betul dimanfaatkan.

“Artinya, kalau mereka mengambil kredit kembali ataupun restrukturisasi dibarengi juga dengan suku bunga kredit yang rendah bagi UMKM,” jelasnya.

Intan mengatakan, sebenarnya sudah banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaku UMKM. Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk bisa mengakses kredit ini.

“Karena itu, harus ada kemudahan lebih bagi UMKM untuk akses permodalan guna mencegah jangan sampai mereka terjerat pinjaman *online* ilegal,” pungkasnya. ■ KAL